

Analisis pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi swasta di tingkat kabupaten/kota di Indonesia

Maruli Tua^{1, a*}, Benedictus Raksaka Mahi^{2, b}

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta, 12950, Indonesia

² Universitas Indonesia, Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, UI Depok, West Java, 16424, Indonesia

^a maruli.tua@kpk.go.id; ^b mahiraksaka@gmail.com

* Corresponding Author

Abstrak: Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi swasta. Pemberantasan korupsi oleh KPK diharapkan dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap keputusan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Penelitian ini mengkaji pengaruh jangka panjang pencegahan korupsi terhadap akumulasi investasi swasta di daerah menggunakan analisis data *cross-sectional* dari 507 kabupaten dan kota menggunakan data 2018-2020. Pengujian menggunakan regresi linier berganda dengan variabel independen berupa monitoring center for prevention (MCP) sebagai indeks pencegahan korupsi. Dengan menggunakan estimator *White Robust*, hasil penelitian membuktikan bahwa efek pencegahan korupsi dalam jangka panjang adalah positif dan signifikan terhadap akumulasi investasi secara keseluruhan di tingkat kabupaten dan kota. Skor MCP suatu wilayah lebih besar dari wilayah lain selama tiga tahun, sehingga akumulasi investasi lebih besar. Hasil penelitian ini memperkuat urgensi pengarusutamaan pencegahan korupsi sebagai pilihan tepat dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Agar pemerintah daerah mau terlibat dalam pemberantasan korupsi, pemerintah diharapkan menyediakan dana insentif daerah (DID) yang berkelanjutan.

Kata Kunci: MCP, pencegahan korupsi, investasi swasta, analisis data *cross-sectional*

How to Cite: Tua, M., & Mahi, B. R. (2022). Analysis of the effect of corruption prevention on private investment at the district/city level in Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 247-258. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.915>



Pendahuluan

Darurat korupsi di Indonesia menghadapi tantangan besar di daerah. Implementasi otonomi daerah di satu sisi mengakselerasi tingkat korupsi. Data penanganan perkara korupsi oleh KPK menunjukkan bahwa sejak tahun 2010-2019, perkara korupsi di daerah terus bertambah. Masifnya praktik korupsi berdampak terhadap rendahnya kualitas dan efisiensi layanan publik, rendahnya aliran investasi ke daerah, dan pada akhirnya menimbulkan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi (de Asis, 2000). Salah satu dampaknya adalah terhadap persepsi investor yang menempatkan faktor korupsi di Indonesia sebagai penghambat nomor satu terhadap investasi (Schwab, 2017).

Indonesia memiliki lembaga khusus yang memberantas korupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara umum bentuk korupsi yang berkembang di Indonesia mirip dengan enam bentuk korupsi yang berkembang di negara lain, yaitu suap (*bribery*), kecurangan (*fraud*), penggelapan (*embezzlement*), pemerasan (*extortion*), *favoritism* dan nepotisme. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK juga diselaraskan dengan visi pembangunan pemerintah, terutama untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha sebagaimana visi Nawacita Presiden Joko Widodo.

KPK mengembangkan mekanisme koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Mekanisme tersebut dikenal di kalangan pemerintah daerah dengan nama *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang fokus pada pencegahan korupsi di delapan area rawan korupsi di daerah. Area tersebut antara lain: perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), perizinan terpadu satu pintu (PTSP), penguatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. MCP menjadi instrument bagi Pemda untuk meningkatkan kinerja pencegahan korupsi di masing-masing daerah.

Upaya tersebut diyakini akan lebih bermanfaat dan berdampak terhadap masyarakat di tingkat lokal (de Asis, 2000) dan juga terhadap investor yang akan menanamkan modalnya.

Berdasarkan data investasi dari Kementerian Investasi dan data MCP dari KPK, terdapat kecenderungan dan korelasi antara skor MCP dengan investasi di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Di beberapa daerah, skor MCP mengalami tren naik maka investasi meningkat, sebaliknya, skor MCP turun maka investasi berkurang. Investasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah akumulasi investasi atas barang modal yang bersifat jangka panjang. Data yang tersedia dalam penelitian ini hanya tiga tahun yaitu 2018-2020. Sehingga untuk memberikan efek dan ekspektasi jangka panjang, untuk investasi dilakukan penjumlahan pada periode 2018-2020. Sedangkan untuk skor MCP dan variable lainnya dilakukan pengukuran dengan metode rata-rata (*mean*). Penggunaan metode rata-rata dalam statistik berguna untuk membuat variasi alami dalam data berulang terlihat seperti perubahan nyata (Barnett et al., 2005). Itu terjadi ketika pengukuran yang luar biasa besar atau kecil cenderung diikuti oleh pengukuran yang lebih dekat dengan *mean*.

Belum ada studi yang spesifik yang meneliti pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi swasta di Indonesia. Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan terhadap sejumlah negara yang didominasi dengan penggunaan enam indikator tata kelola (*governance index*) yang dikembangkan oleh Kaufmann et al. (2009), salah satunya adalah pencegahan korupsi (*control of corruption*). Hasil penelitian secara dominan menunjukkan bahwa pencegahan korupsi berdampak positif dan signifikan terhadap investasi (Aysan et al., 2007; Globerman et al., 2006; Hayat, 2019; Mengistu & Adhikary, 2011). Penelitian Globerman et al. (2006) menunjukkan bahwa pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi di negara-negara berkembang lebih signifikan dibandingkan negara maju karena adanya *marginal effects of governance*. Semakin maju suatu negara maka pengaruh *governance* terhadap investasi menjadi lebih rendah dibandingkan terhadap negara berkembang. Namun penelitian oleh Peres et al. (2018) menunjukkan hasil sebaliknya yaitu bahwa pencegahan korupsi di negara-negara berkembang tidak berpengaruh terhadap investasi. Hal tersebut disebabkan lemahnya upaya pencegahan korupsi dan implementasi *rule of law* di negara-negara berkembang.

Kesenjangan hasil penelitian terkait dengan signifikansi pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi di negara berkembang menarik untuk dilakukan penelitian. Adanya keberagaman karakteristik setiap negara memberikan kesadaran untuk melakukan penelitian yang difokuskan di Indonesia pada tingkat kabupaten dan kota. Apalagi diketahui bahwa belum pernah dilakukan penelitian yang khusus meneliti pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi swasta di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Sedangkan telah dilakukan upaya pencegahan korupsi di daerah yang termonitor melalui MCP. Upaya pencegahan korupsi oleh Pemda diprediksi lebih berdampak karena Pemda dianggap lebih memahami karakteristik daerah dan permasalahannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebanyak 507 daerah kabupaten dan kota di Indonesia, dengan pengecualian adalah Provinsi DKI Jakarta karena kota dan kabupaten yang ada hanya menyelenggarakan fungsi administratif. Variabel dependen adalah investasi sedangkan variabel independen utama adalah pencegahan korupsi. Variabel independen lainnya adalah produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Faktor tenaga kerja berupa jumlah angkatan kerja dan kualitas angkatan kerja menjadi variabel kontrol.

Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2018), berdasarkan *theory of the firm*, asumsi dasar perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. *Theory of the firm* sebagai fungsi produksi, di mana perusahaan memaksimalkan keuntungan (Williamson, 2002). Teori ini menyatakan bahwa sifat keseluruhan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang berarti menciptakan kesenjangan antara pendapatan dan biaya. Perusahaan mengoptimalkan permintaan modalnya dengan cara melakukan minimisasi biaya yang merupakan salah satu bagian penting dari *theory of the firm*. Investasi dalam penelitian ini adalah akumulasi investasi periode tahun 2018-2020 untuk masing-masing daerah. Mengenai permintaan modal dan minimisasi biaya akan diuraikan pada bagian selanjutnya artikel ini.

Pencegahan korupsi adalah variabel independen utama dalam penelitian ini. Indeks pencegahan korupsi menjadi proksi pencegahan korupsi yang merupakan skor MCP, bersumber dari KPK. Penelitian ini adalah penelitian pertama yang menggunakan skor MCP sebagai proksi pencegahan korupsi. Penjelasan mengenai korupsi, pencegahan korupsi dan MCP akan diuraikan pada bagian selanjutnya artikel ini.

Output perekonomian daerah menjadi faktor berpengaruh terhadap keputusan investasi. Atraktivitas dan potensi ekonomi makro menjadi pertimbangan rasional bagi investor karena dianggap sebagai ukuran pasar (*market size*) yang dapat mendukung tujuan investasi. Besar kecilnya *market size* biasanya berkaitan dengan potensi ekonomi. Proksi *market size* yang umum digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita karena mencerminkan penghasilan masyarakat di masing-masing daerah.

Dalam penelitian ini, faktor tenaga kerja menjadi variabel kontrol terhadap investasi. Faktor tenaga kerja menggunakan dua variabel, yaitu angkatan kerja dan kualitas pendidikan tenaga kerja. Hal tersebut mengingat alasan utama investor asing berekspansi ke luar negeri adalah ketersediaan tenaga kerja murah yang akan menurunkan biaya produksi mereka, dibandingkan dengan negara asal (Dunning & Lundan, 2008). Angkatan kerja telah diterima sebagai salah satu faktor positif yang mempengaruhi investasi terutama di negara berkembang (Nguyen, 2020). Variabel angkatan kerja adalah proksi ketersediaan tenaga kerja (*labour force*). Menurut Badan Pusat Statistik (2021) angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Ketersediaan SDM berkualitas dalam jumlah besar memudahkan suatu negara menyerap produk baru atau ide-ide yang telah ditemukan di tempat lain (Nelson & Phelps, 1965). Bahwa perbedaan tingkat pendidikan atau sumber daya manusia suatu negara menyebabkan perbedaan dalam kapasitas penduduk. Selanjutnya memotivasi investor asing untuk memasok modal ke negara dengan kualitas SDM yang lebih baik. Kualitas pendidikan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) diproksikan dengan rata-rata lama sekolah (RLS).

Permintaan Modal dan Minimisasi Biaya

Untuk mencapai tujuan usaha dan bisa terus bersaing dalam perekonomian yang kompetitif, setiap perusahaan perlu meningkatkan modal dengan cara melakukan investasi. Peningkatan investasi mengakibatkan terjadinya permintaan terhadap modal (*demand for capital*). Permintaan modal adalah jumlah yang ingin diinvestasikan oleh pengusaha, yaitu jumlah yang dibutuhkan pengusaha untuk membeli barang modal seperti peralatan, pabrik, mesin, peralatan dan lain-lain yang dapat digunakan untuk produksi barang dan jasa. Perusahaan mengoptimalkan permintaan modal dengan cara melakukan minimisasi biaya sebagaimana *theory of the firm*. Pindyck dan Rubinfeld (2018) fokus menggunakan *labor* (L) dan *capital* (K) untuk menjaga analisis yang dilakukan tetap sederhana. Sehingga fungsi minimisasi biaya dituliskan sebagai berikut:

$$C = wL + rK \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{tunduk pada kendala: } Q = F(K,L) \dots\dots\dots (2)$$

Fungsi Lagrange digunakan untuk mengatasi kendala ini, sebagai berikut:

$$L = wL + rK - \lambda[F(K, L) - q_0] \dots\dots\dots (3)$$

langkah selanjutnya adalah melakukan penurunan (*first order condition*) untuk mendapatkan kondisi minimum, sebagai berikut:

$$\partial L / \partial K = r - \lambda L = 0 \dots\dots\dots (4)$$

$$\partial L / \partial L = w - \lambda K = 0 \dots\dots\dots (5)$$

$$\partial L / \partial \lambda = Q - KL = 0 \dots\dots\dots (6)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (4) dan persamaan (5) maka didapatkan:

$$K = (w/r) L \dots\dots\dots (7)$$

Setelah dilakukan substitusi persamaan (6) dan persamaan (7) maka:

$$Q = KL \rightarrow Q = K [(r/w) K] \rightarrow Q = r/w K$$

$$Qw = rK^2 \rightarrow K^2 = Qw/r$$

sehingga permintaan K untuk meminimalkan biaya dituliskan sebagai berikut:

$$K^d = \sqrt{Qw/r} \dots\dots\dots (8)$$

Dalam praktiknya, untuk merencanakan dan menjalankan usaha, investor berhadapan dengan permasalahan biaya tidak resmi atau biaya informal, selain biaya resmi yang ditetapkan. Korupsi berbentuk *bribery*, *extortion*, dan *illegal gratuity* termasuk dalam biaya informal yang dikapitalisir oleh investor dan mempengaruhi daya saingnya. Jika korupsi dilambangkan χ dan biaya korupsi adalah ζ serta indeks pencegahan korupsi adalah θ , maka fungsi produksi adalah:

$$Y = \chi^{1-\theta} KL \dots\dots\dots (9)$$

dengan fungsi biaya: $C = wL + rK + \zeta \chi \dots\dots\dots (10)$

Persamaan (9) dan persamaan (10) diturunkan sebagai berikut:

$$L = wL + rK + \zeta \chi + \lambda [Y - (\chi^{1-\theta} KL)]$$

$$L = wL + rK + \zeta \chi + Y\lambda - \chi^{1-\theta} KL\lambda$$

$$\partial L / \partial K = w - \chi^{1-\theta} K\lambda = 0 \rightarrow \lambda = w / (\chi^{1-\theta} K)$$

$$\partial L / \partial L = r - \chi^{1-\theta} L\lambda = 0 \rightarrow \lambda = r / (\chi^{1-\theta} L)$$

$$\partial L / \partial \lambda = Y - \chi^{1-\theta} KL = 0 \rightarrow Y = \chi^{1-\theta} K[(r/w)K] \rightarrow Y = \chi^{1-\theta} (r/w)K^2$$

$$K^2 = \frac{Y.W}{\chi^{1-\theta}.r} \rightarrow K^d = \sqrt{\frac{Yw}{\chi^{1-\theta} r}}$$

$$\Leftrightarrow K^d = \frac{\sqrt{Yw}}{r} \cdot \chi^{\frac{\theta-1}{2}}$$

sehingga $\frac{\partial K}{\partial \theta} = \sqrt{\frac{Yw}{r}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \chi^{\frac{\theta-1}{2}} \cdot \ln \chi \dots\dots\dots (11)$

dimana jika $\frac{\partial K}{\partial \theta} > 0$ maka semakin tinggi indeks pencegahan korupsi (MCP) berdampak terhadap jumlah investasi yang terakumulasi menjadi capital (K) semakin besar. Namun jika hasilnya adalah $\frac{\partial K}{\partial \theta} < 0$ maka semakin tinggi indeks pencegahan korupsi (MCP) malah berdampak terhadap rendahnya jumlah investasi yang terakumulasi menjadi capital (K).

Korupsi dan Pencegahan Korupsi

Secara umum, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Transparency International, 2009). Namun pemaknaan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi mengalami ambiguitas, satu kelompok menganggap korupsi bisa mengefisienkan usaha para pelaku usaha (*corruption as grease of the wheel*) dan kelompok lain memandang korupsi sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi (*corruption as sand of the wheel*).

Kubu pertama dimotori oleh Huntington, 2006; dan Leff (1964) yang pada intinya menyampaikan bahwa korupsi bertindak sebagai pelicin (*speed money*) bagi pelaku usaha untuk mendapatkan layanan perizinan atau layanan administrasi yang berbelit-belit oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kelompok kedua berargumen bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi ber-dampak negatif terhadap pertumbuhan juga didukung oleh Murphy et al. (1991). Menurut Mauro (1995), korupsi berakibat terhadap turunnya *growth* melalui beberapa saluran yang diantaranya adalah bahwa korupsi dalam bentuk suap dianggap sebagai pajak oleh pelaku usaha namun karena sifatnya yang tertutup dan penuh ketidakpastian (*uncertainty*) mengakibatkan berkurangnya insentif investasi.

Menurut Dzhumashev (2009), korupsi mempengaruhi investasi melalui peningkatan ketidakpastian (*uncertainty*) dan produktivitas berkurang. Ketidakpastian membutuhkan premi tambahan pada pengembalian investasi sehingga korupsi menaikkan *rate* bunga riil dan mengarah ke permintaan investasi yang lebih rendah. Menurut Dzhumashev (2009), korupsi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dampak langsung kepada investasi. Penelitian oleh Zhao et al. (2003) menunjukkan pengaruh korupsi terhadap investasi berubah seiring waktu dan menunjukkan hubungan berbentuk U serta dengan asumsi bahwa komitmen dan tindakan pencegahan korupsi dilaksanakan secara konsisten dan terlembaga. Korupsi yang awalnya merintangikan pelaku usaha untuk berinvestasi mengakibatkan turunnya aliran investasi namun kurva menurun tersebut bisa dicegah karena sebab korupsi dapat diatasi dengan upaya pencegahan korupsi.

Menurut Azfar (2007), teori keagenan (*agency theory*) lebih efektif bagi pengendalian korupsi. Hal ini mengingat sudut pandang pemerintah dan masyarakat, dimana masyarakat selaku *principal* dan pemerintah sebagai *agent* yang menyelenggarakan pemerintahan. *Agent* mempunyai akses langsung dan informasi yang lebih banyak dibandingkan *principal*. Persoalan inilah yang menyebabkan munculnya *asymmetric information* yang mengakibatkan praktik korupsi oleh oknum *agent*. Mengingat permasalahan tersebut, pengawasan mekanisme penting untuk mengendalikan korupsi. Klitgaard (1988) mendalilkan bahwa akuntabilitas adalah unsur penting sebagai upaya pencegahan dan menekan korupsi. Menurut Camargo (2011), ada lima komponen yang perlu ada agar hubungan yang akuntabel terjadi dalam tata kelola publik, antara lain: delegasi, pembiayaan, keberlakuan, informasi tentang kinerja, dan monitoring. Hubungan prinsipal-agen untuk mencapai akuntabilitas tersebut ditunjukkan sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Komponen Hubungan Prinsipal-Agen Yang Akuntabel (Camargo, 2011)

Pencegahan korupsi adalah salah satu bagian dari *governance institution* (Kaufmann et al., 2009) untuk mengukur baik atau buruknya kualitas *governance institution* di suatu negara. *Governance institution* menciptakan ketertiban dan mengurangi *uncertainty* dalam aktivitas ekonomi (North, 1991). *Uncertainty* meningkatkan biaya tidak resmi dan terakumulasi sebagai *transaction cost* karena pelaku usaha harus mempersiapkan anggaran ekstra untuk operasional usahanya. Menurut pandangan ekonomi neoklasik, pasar yang efisien membutuhkan ketiadaan *transaction cost*. Ketika *transaction cost* signifikan maka *governance institution* menjadi penting (North, 1992). Investasi bersifat elastis terhadap *transaction cost of investment* (Mengistu & Adhikary, 2011) yang artinya bahwa investasi cenderung mengalir ke negara di mana investor memiliki ekspektasi keberlangsungan usahanya (*going concern*) serta mendapatkan hasil yang optimal atas investasinya.

Indeks Pencegahan Korupsi (MCP)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan skor MCP sebagai indeks pencegahan korupsi. MCP bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas di pemerintah daerah dengan mengoptimalkan relasi lima komponen yang diuraikan oleh Camargo (2011). Saat ini, MCP menggambarkan pencegahan korupsi di delapan area rawan korupsi di daerah, yaitu di sektor perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan terpadu satu pintu (perizinan dan non perizinan), pengawasan intern oleh APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah. Kerawanan area tersebut ditunjukkan dari data penang-

anan perkara di KPK pada tahun 2017-2021 dimana sekitar 75% kasus korupsi di daerah terjadi pada area rawan korupsi sebagaimana MCP. Untuk data tahun 2021 adalah sampai dengan akhir November 2021. Datanya seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penanganan Perkara Korupsi dan Hubungannya dengan MCP

No.	Area Pencegahan Korupsi	Tahun					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021*	
1.	Perencanaan dan Penganggaran APBD	22	65	30	17	48	182
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	29	47	52	58	30	216
3.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Perizinan	14	22	18	6	2	62
4.	Manajemen ASN	8	4	6	0	2	20
5..	Optimalisasi Pendapatan Daerah/ Terkait Pajak	0	3	5	0	0	8
6.	Manajemen Aset Daerah	0	0	0	0	0	0
7.	Tata Kelola Dana Desa	4	0	0	0	0	4
8.	Penguatan APIP	0	0	0	0	0	0
9.	Lain-lain	43	58	34	10	19	164
	Jumlah	120	199	145	91	101	656

Sumber: KPK (2001), data diolah

MCP mengukur capaian (*progress*) pencegahan korupsi masing-masing Pemda. Setiap indikator yang memiliki bobot dan penilaian tersendiri. Skor MCP berada pada kisaran 0-100, dimana semakin mendekati 100 maka capaian (*progress*) program pencegahan korupsi dari delapan menu tersebut adalah semakin baik. Untuk memudahkan Pemda memenuhi indikator dan sub-indikator tersebut, KPK mengeluarkan pedoman MCP setiap tahun. KPK membentuk tim untuk melakukan verifikasi atas pemenuhan indikator dan sub-indikator karena sifat MCP adalah *evidence based*. Proses verifikasi dilakukan secara langsung di lapangan namun lebih banyak melalui pemeriksaan data dan dokumen yang sudah diunggah secara elektronik di aplikasi MCP. Skor MCP yang dihasilkan adalah untuk seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia.

MCP telah secara intensif disosialisasikan oleh KPK kepada para pelaku usaha dan asosiasi usaha baik pelaku usaha di nasional maupun pelaku usaha internasional. Sosialisasi kepada pelaku usaha nasional terutama melalui asosiasi KADIN dan berbagai asosiasi usaha sektoral. Kepada pelaku usaha internasional terutama melalui keikutsertaan KPK dalam berbagai kerja sama pemberantasan korupsi internasional dan dalam berbagai forum internasional yang dihadiri oleh KPK. Bahkan KPK memfasilitasi pembentukan komite advokasi daerah (KAD) sebagai forum koordinasi antara pihak regulator (Pemda) dengan pihak pelaku usaha. Forum-forum tersebut dioptimalkan untuk memperkuat pencegahan korupsi di sektor swasta termasuk dengan mensosialisasikan upaya pencegahan korupsi di daerah yang dapat dimonitor melalui MCP.

Kesadaran investor terhadap urgensi *governance* semakin meningkat. Hasil survey yang dilakukan oleh PriceWaterhouse & Cooper (PWC) pada September 2021 terhadap 325 investor global menunjukkan bahwa faktor *governance* bersama dengan faktor lingkungan dan sosial (Environment, Social and Governance/ESG) menjadi perhatian utama (PriceWaterhouseCoopers, 2022).

Jenis dan Sumber Data

Tabel 2. Sumber Data

Variabel	Data	Sumber Data	Satuan	Dampak
Realisasi Investasi	Investasi domestik (PMDN) dan investasi asing langsung (PMA)	Kementerian Investasi	Miliar rupiah	
Pencegahan Korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi	KPK	Indeks	+
PDRB per kapita	PDRB per kapita	Badan Pusat Statistik	Ribu rupiah	+
Tenaga Kerja	Angkatan Kerja	Badan Pusat Statistik	Orang	+
Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Badan Pusat Statistik	Tahun	+

Data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari pihak ketiga. Penelitian ini menganalisis pengaruh jangka panjang pencegahan korupsi terhadap investasi swasta di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Karena investasi terakumulasi menjadi *capital* (K) yang bersifat jangka panjang sementara data yang tersedia hanya untuk periode tiga tahun maka dalam penelitian ini investasi yang dimaksud adalah akumulasi investasi serta menggunakan analisis data *crosssection* untuk menunjukkan ekspektasi dan pengaruh jangka panjang pencegahan korupsi terhadap investasi.

Model Penelitian

Untuk menguji pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi swasta di tingkat kabupaten/kota di Indonesia, secara umum model untuk analisis empiris yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln IT_i = \beta_0 + \beta_1 MCP_i + \beta_2 \ln PDRB_i + \beta_3 \ln AK_i + \beta_4 \ln Pendidikan_i + \varepsilon_i$$

dimana:

Variabel Terikat (Dependen):

IT : Investasi swasta dengan menggunakan harga konstan tahun 2010

Variabel Bebas (Independen):

MCP : Indeks Pencegahan Korupsi di kabupaten/kota

PDRB : Jumlah PDRB per kapita dengan menggunakan harga konstan tahun 2010

Variabel Kontrol:

AK : Jumlah angkatan kerja

Pendidikan: Rata-rata lama sekolah (RLS)

i : Kabupaten/kota i di Indonesia

t : waktu t

β_0 : Parameter konstanta

$\beta_1 - \beta_4$: Estimasi parameter slope

ε : Error

Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

No.	Nama Variabel	Definisi Operasional
Variabel Dependen		
1.	Investasi	Merupakan penjumlahan investasi swasta (akumulasi investasi) pada periode tahun 2018-2020 dengan menggunakan harga konstan tahun 2010. Penjumlahan dilakukan untuk menghilangkan adanya variasi data di tengah dan hal tersebut baik untuk menggambarkan efek jangka panjang yang menjadi sifat investasi
Variabel Independen		
2.	Indeks Pencegahan Korupsi (MCP)	Merupakan penjumlahan skor MCP pada tahun 2018-2020 lalu dibagi tiga atau dengan cara merata-ratakan. Penggunaan metode rata-rata dalam statistik berguna untuk membuat variasi alami dalam data berulang terlihat seperti perubahan nyata (Barnett et al., 2005)
3.	PDRB per kapita	PDRB perkapita adalah rata-rata pendapatan yang diperoleh masing-masing penduduk dalam satu tahun di suatu kabupaten atau kota. Variabel ini merupakan penjumlahan PDRB per kapita pada tahun 2018-2020 dengan harga konstan tahun 2010 yang kemudian dibagi tiga (rata-rata).
4.	Angkatan Kerja	Merupakan proksi ketersediaan tenaga kerja (<i>labour force</i>) yang dihitung berdasarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kategori angkatan kerja terhadap total penduduk 15 tahun ke atas. Variabel ini merupakan penjumlahan angkatan kerja pada tahun 2018-2020 yang kemudian dibagi tiga (rata-rata).
5.	Pendidikan (RLS)	RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk yang bersumber dari data BPS. Variabel ini merupakan penjumlahan angkatan kerja pada tahun 2018-2020 yang kemudian dibagi tiga (rata-rata).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Regresi

Penggunaan metode regresi untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Estimasi Model

Variabel	Koefisien	P> [t]
MCP	0.0396996	0.007
LnPDRB	1.114158	0.001
LnAngkatan Kerja	1.626872	0.000
LnRLS	9.772427	0.000
Konstanta	-35.42222	0.000

Prob > F = 0.0000; Adj R-squared = 0,4505

Sumber: Hasil Perhitungan

Hasil estimasi mengindikasikan pengaruh positif dan signifikan antara variabel Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) yang merupakan proksi pencegahan korupsi di Pemda dengan investasi swasta di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia. Variabel PDRB per kapita, angkatan kerja dan RLS juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap investasi di daerah.

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode *white test* terindikasi adanya masalah heteroskedastisitas yang mana model seharusnya bersifat homoskedastisitas. Untuk mengatasi tersebut dilakukan estimasi dengan menggunakan *White Robust estimator*. Hasil estimasi dengan memakai *White Robust estimator* dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Estimasi *White Robust*

Variabel	Koefisien	P> [t]
MCP	0.0396996	0.015
LnPDRB	1.114158	0.000
LnAngkatan Kerja	1.626872	0.000
LnRLS	9.772427	0.000
Konstanta	-35.42222	0.000

Prob > F = 0.0000

Adj R-squared = 0,4548

Sumber: Hasil Perhitungan

Dengan membandingkan antara Tabel 4 dan Tabel 5, hasil tersebut menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat hampir tidak terdapat perbedaan. Terutama variabel MCP yang menjadi fokus penelitian arah hubungan tidak berubah demikian juga signifikansinya. Hanya terdapat sedikit perubahan pada variabel MCP dari yang sebelumnya tingkat signifikansi berada pada alpha (α) 1% menjadi signifikan pada α 5%. Dengan tingkat signifikansi sebesar itu, variabel MCP disimpulkan berpengaruh signifikan terhadap variabel investasi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi dengan metode *White Robust* mengindikasikan pengaruh positif dan signifikan antara variabel Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) yang merupakan proksi pencegahan korupsi di Pemda dengan investasi swasta di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia. Koefisien yang ditunjukkan adalah sebesar 0,0397 yang berarti bahwa kenaikan 1 poin skor MCP berpengaruh terhadap investasi masuk sebesar 0,0397%.

Demikian juga untuk PDRB per kapita, angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil studi terdahulu. PDRB per kapita, angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi pada tingkat kepercayaan sebesar 99%. Koefisien PDRB menunjukkan angka sebesar 1,114. Hal ini berarti bahwa pengaruh kenaikan PDRB per kapita cukup besar terhadap peningkatan investasi, dimana kenaikan 1% PDRB per kapita berpengaruh terhadap investasi sebesar 1,114%. Hasil ini sesuai dengan

hipotesis awal dan mendukung penelitian-penelitian sebelumnya oleh Mengistu dan Adhikary, (2011); Peres et al. (2018).

Pengaruh angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah juga cukup besar terhadap investasi. Kenaikan 1% jumlah angkatan kerja berpengaruh sebesar 1,627% terhadap investasi. Sedangkan kenaikan 1% rata-rata lama sekolah berpengaruh sebesar 9,772% investasi di kabupaten/kota di Indonesia. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal dan sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait angkatan kerja oleh (Dunning, 1994) dan (Nguyen, 2020) serta penelitian terkait kualitas SDM oleh Nelson dan Phelps (1965).

Indeks pencegahan korupsi (MCP) yang dipublikasikan oleh KPK menjadi variabel utama dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, pencegahan korupsi bukan hanya berpengaruh positif namun juga signifikan terhadap investasi swasta di daerah. Hasil penelitian ini mendukung temuan pada penelitian sebelumnya dari Aysan et al. (2007); Gliberman et al. (2006); Mengistu dan Adhikary (2011), yang menemukan jika terdapat hubungan positif dan signifikan antara upaya pencegahan korupsi dengan investasi swasta. Studi ini menunjukkan bahwa investor mempertimbangkan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemda karena manfaat dan dampaknya lebih dirasakan (de Asis, 2000). Pemda dianggap lebih memahami kondisi dan tantangan daerahnya masing-masing terkait dengan upaya penanganan praktik korupsi. Pemda diharapkan untuk melakukan upaya pencegahan korupsi secara lebih sistematis dan jangka panjang (Zhao et al., 2003) mengingat perilaku dan praktik korupsi juga berlangsung dalam waktu yang cukup panjang.

Pembenahan tata kelola dengan fokus pada delapan area rawan korupsi tercermin pada besar atau kecilnya skor MCP. Skor MCP yang besar secara jangka panjang terkonfirmasi berdampak positif dan signifikan terhadap upaya meningkatkan ekonomi melalui investasi. Skor MCP yang tinggi selanjutnya berpengaruh terhadap persepsi investor bahwa pemerintah berupaya serius untuk menekan praktik korupsi. Hal ini bersesuaian dengan survey yang dilakukan oleh World Economic Forum (Schwab, 2017) yang menyimpulkan bahwa korupsi berada di peringkat pertama dari 16 faktor penghambat investasi di Indonesia. Pelaksanaan tugas koordinasi, monitoring dan pencegahan korupsi yang sistemik oleh KPK diharapkan akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang akibatnya akan semakin mengefektifkan pencegahan korupsi.

Pemerintah harus mendukung upaya peningkatan kualitas pencegahan korupsi di daerah melalui kebijakan pemberian dana insentif daerah (DID). Dukungan kebijakan melalui dana insentif telah terbukti lebih efektif untuk memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pencegahan korupsi karena adanya mekanisme pemberian *reward and punishment* atas pencapaian kinerja (Abidin, 2015; Ahdiyana, 2009). Sejak tahun 2020 KPK telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan DID kategori pencegahan korupsi kepada 34 Pemda. Kementerian Keuangan telah menganggarkan sebesar Rp 317 Milyar atau hanya 2,3% dari pagu DID. Sedangkan untuk anggaran tahun 2022, KPK mengusulkan sebanyak 62 Pemda untuk menerima DID kategori pencegahan korupsi. Namun jumlah Pemda yang menerima DID yang ditetapkan hanya sebanyak 20 Pemda dan besaran DID yang diterima turun dibandingkan tahun 2021 menjadi sebesar Rp 135 Milyar. Kendalanya adalah sedikitnya pagu anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk pemberian DID bagi kategori pencegahan korupsi. Dalam rangka lebih memotivasi Pemda untuk semakin meningkatkan kualitas pencegahan korupsi di daerahnya masing-masing, pemberian DID merupakan alternatif kebijakan yang lebih sistemik dan berkelanjutan. Dampak paling nyata adalah meningkatnya persepsi investor atas kepastian berusaha di daerah yang pada ujungnya akan meningkatkan investasi ke daerah yang dinilai baik dalam hal pencegahan korupsi.

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: **Pertama**, Koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK secara jangka panjang memberikan efek yang positif dan signifikan terhadap investasi swasta di Indonesia. KPK sebagai lembaga khusus diberikan mandat untuk memberantas dan mencegah korupsi telah membangun suatu sistem pencegahan dan

monitoring korupsi yang disebut *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang menghasilkan indeks pencegahan korupsi. Skor MCP suatu wilayah lebih besar dari wilayah lain selama tiga tahun, sehingga akumulasi investasi lebih besar. MCP menggambarkan upaya pencegahan korupsi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemda. Investor sebagai salah satu *economic agent* mendapatkan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat terkait upaya pencegahan korupsi di daerah sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan investasi di masing-masing daerah tersebut; **Kedua**, Faktor perekonomian daerah yang menggambarkan *market size* yang diwakili oleh PDRB perkapita masih menjadi pertimbangan penting investor untuk mempertimbangkan keputusan investasinya; dan **Ketiga**, Faktor ketenagakerjaan juga memegang peranan utama untuk mempengaruhi investor menanamkan modalnya di suatu daerah. Ketersediaan jumlah tenaga kerja yang mencukupi serta berkualitas berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah yang menjadi proksi kualitas SDM berpengaruh sangat signifikan terhadap investasi swasta. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih baik semakin dicari oleh investor untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.

Rekomendasi Kebijakan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan, sebagai berikut: **Pertama**, Pemerintah agar melakukan seleksi pemberian dana insentif daerah (DID) yang lebih baik, dengan menggunakan indikator kinerja MCP, agar setiap Pemda meningkatkan kinerjanya untuk mencapai skor MCP yang tinggi. Pemerintah daerah yang menerima DID menggunakan dana tersebut untuk memperkuat kelembagaan pencegahan korupsi dengan lebih terstruktur, sistematis dan massif; **Kedua**, Pemerintah agar merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih spesifik terhadap daerah-daerah dengan tahun rata-rata lama sekolah (RLS) yang rendah. Fokus terutama dilakukan di daerah timur Indonesia (Papua dan Papua Barat) yang tingkat pendidikan masih relatif rendah namun memiliki potensi ekonomi besar; dan **Ketiga**, Mengingat pentingnya untuk melakukan kajian terhadap arus masuk investasi di daerah, maka sebaiknya Kementerian Investasi/BKPM selalu melakukan pengecekan/verifikasi data investasi ke daerah secara rutin untuk menjamin akurasi data.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih terdapat berbagai keterbatasan yang perlu disempurnakan untuk penelitian selanjutnya di masa depan, yaitu: variabel independen yang digunakan terbatas hanya periode tahun 2018-2020 dikarenakan KPK baru mengumumkan indeks pencegahan korupsi (MCP) sejak tahun 2018. Disamping itu Variabel kontrol yang digunakan masih terbatas pada faktor ekonomi daerah berupa PDRB per kapita serta faktor ketenagakerjaan (angkatan kerja dan kualitas pendidikan) mengingat keterbatasan data pada faktor lainnya yaitu faktor infrastruktur, faktor keamanan, dan faktor-faktor terkait lainnya.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas kebijakan dana insentif daerah dalam mendukung kinerja pemerintahan provinsi dan kesejahteraan masyarakat. *Civil Service Journal*, 9(1). <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/56>
- Ahdiyana, M. (2009). Memperkuat manajemen strategis dengan pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik. *Jurnal Ekonomi UNY*, 1-14.
- Aysan, A. F., Nabli, M. K., & Véqanzonès-Varoudakis, M.-A. (2007). Governance institutions and private investment: An application to the Middle East and North Africa. *The Developing Economies*, 45(3), 339-377. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2007.00042.x>
- Azfar, O. (2007). Disrupting corruption. In *Performance accountability and combating corruption* (pp. 255-283). World Bank Washington DC.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2021*.
- Barnett, A. G., Pols, J. C. van der, & Dobson, A. J. (2005). Regression to the mean: what it is and

- how to deal with it. *International Journal of Epidemiology*, 34(1), 215–220.
<https://doi.org/10.1093/ije/dyh299>
- Camargo, C. B. (2011). *Accountability for better healthcare provision: A framework and guidelines to define understand and assess accountability in health systems* (10). Basel Institute on Governance. <https://edoc.unibas.ch/66328/>
- de Asis, M. G. (2000). *Reducing corruption at the local level*. The World Bank.
<https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US2012411674>
- Dunning, J. H. (1994). *Reevaluating the benefits of foreign direct investment*. University of Reading, Department of Economics New York, NY.
- Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2008). *Multinational enterprises and the global economy*. Edward Elgar Publishing.
- Dzhumashev, R. (2009). *Is there a direct effect of corruption on growth?* Munich Personal RePEc Archive. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/18489/>
- Globerman, S., Shapiro, D., & Tang, Y. (2006). Foreign direct investment in emerging and transition european countries. In J. A. Batten & C. Kearney (Eds.), *Emerging European Financial Markets: Independence and Integration Post-Enlargement* (Vol. 6, pp. 431–459). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1016/S1569-3767\(05\)06017-6](https://doi.org/10.1016/S1569-3767(05)06017-6)
- Hayat, A. (2019). Foreign direct investments, institutional quality, and economic growth. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 28(5), 561–579.
<https://doi.org/10.1080/09638199.2018.1564064>
- Huntington, S. P. (2006). *Political order in changing societies*. Yale University Press.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). Governance matters VIII: aggregate and individual governance indicators, 1996-2008. In *World bank policy research working paper* (No. 4978). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?Abstract_id=1424591
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Leff, N. H. (1964). Economic development through bureaucratic corruption. *American Behavioral Scientist*, 8(3), 8–14. <https://doi.org/10.1177/000276426400800303>
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712.
<https://doi.org/10.2307/2946696>
- Mengistu, A. A., & Adhikary, B. K. (2011). Does good governance matter for FDI inflows? Evidence from Asian economies. *Asia Pacific Business Review*, 17(3), 281–299.
<https://doi.org/10.1080/13602381003755765>
- Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1991). The allocation of talent: Implications for growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 503. <https://doi.org/10.2307/2937945>
- Nelson, R. R., & Phelps, E. S. (1965). *Investment in humans, technological diffusion and economic growth* (419).
- Nguyen, C. H. (2020). Labor force and foreign direct investment: Empirical evidence from Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 103–112.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.103>
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112.
- North, D. C. (1992). *Transaction costs, institutions, and economic performance*. ICS Press San Francisco, CA.
- Peres, M., Ameer, W., & Xu, H. (2018). The impact of institutional quality on foreign direct investment inflows: evidence for developed and developing countries. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 31(1), 626–644.
<https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1438906>
- Pindyck, R., & Rubinfeld, D. (2018). *Macroeconomics, (Global edition)*. Pearson Education.
- PriceWaterhouseCoopers. (2022). *PwC's US investor survey: The economic realities of ESG*.
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/in_the_loop/in_the_loop_US/theeconomicrealit

iesofESG.html

- Schwab, K. (2017). *The global competitiveness report 2017-2018*. World Economic Forum.
- Transparency International. (2009). *The anti-corruption plain language guide*. Transparency International Berlin.
- Williamson, O. E. (2002). The theory of the firm as governance structure: from choice to contract. *Journal of Economic Perspectives*, 16(3), 171–195.
<https://doi.org/10.1257/089533002760278776>
- Zhao, J. H., Kim, S. H., & Du, J. (2003). The impact of corruption and transparency on foreign direct investment: an empirical analysis (1). *Management International Review*, 43(1), 41–63.